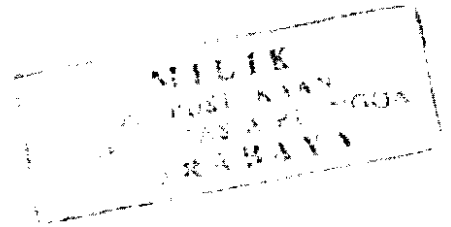


PEMIKIRAN MAHASISWA TENTANG KORUPSI ERA ORDE BARU

STUDI DESKRIPTIF PEMIKIRAN PARA AKTIVIS MAHASISWA
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI



OLEH :

WAHYU ARDHI

NIM : 079414506

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

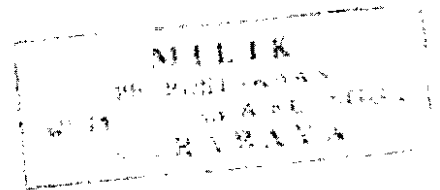
Semester Genap Tahun 1999 / 2000

PEMIKIRAN MAHASISWA TENTANG KORUPSI ERA ORDE BARU

**STUDI DESKRIPTIF PEMIKIRAN PARA AKTIVIS MAHASISWA
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



OLEH :

WAHYU ARDHI

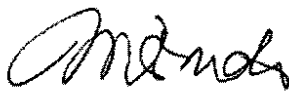
NIM : 079414508

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A**

Semester Gasal Tahun 1999 / 2000

Setuju untuk diujikan
Surabaya, 20 April 2000

Dosen pembimbing

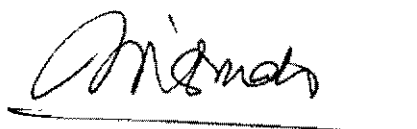


Drs. Priyatmoko, MA
NIP. 130 937 952

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji pada tanggal
4 Mei 2000

Panitia Penguji berdiri dari :

Ketua



Drs. Priyatmoko, MA
NIP. 130 937 952

Anggota



Drs. Haryadi, MSi.
NIP. 131 653 466

Anggota



Drs. Krishugroho, MA.
NIP. 131 801 408

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Menurut persepsi aktivis mahasiswa, definisi atau pengertian korupsi dapat dipahami dari tiga pendekatan. Pertama, pendekatan hukum. Pendekatan ini memfokuskan pada unsur pelanggaran hukumnya, serta akibat yang ditimbulkan berupa kerugian pada keuangan negara. Negara di sini adalah negara yang punya fungsi pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat. Kedua, pendekatan birokrasi. Menurut pendekatan ini, korupsi bisa dicermati dari tiga hal yang berhubungan dengan birokrasi. Ketiga hal itu adalah kinerja birokrasi yang rusak, keterlibatan aparat (oknum) birokrasi, dan penyalahgunaan atas wewenang yang dimiliki. Ketiga, pendekatan ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa motif ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi pendorong orang melakukan korupsi. Dengan demikian korupsi dari pendekatan hukum dinyatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum dilakukan oleh oknum dan mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Menurut pendekatan birokrasi, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang terhadap jabatan dalam suatu struktur birokrasi yang dilakukan oleh oknum aparatur negara dengan inemanfaatkan kinerja birokrasi yang rusak. Sedangkan dari pendekatan ekonomi dapat dinyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang yang didorong oleh motif-motif

ekonomi untuk kepentingan pribadi (memperkaya diri sendiri) sementara pihak lain mengalami kerugian secara ekonomis.

2. Korupsi era Orde Baru tumbuh dan berlangsung karena tiga alasan utama. Pertama, dominasi dan intervensi militer. Sejak menjadi penguasa rezim Orde Baru, Soeharto mengendalikan kekuasaannya dengan cara memasukkan para jenderal dan melibatkan kekuatan militer ke dalam jaringan pemerintahan maupun badan-badan ekonomi (milik negara). Jaringan kerjanya dibentuk dalam bingkai patronase serta memanfaatkan model kekuasaan yang bersifat otoritarian dan sentralistik. Kedua, kapitalisasi dalam pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi mengakibatkan akumulasi kapital secara besar-besaran di Indonesia dari para investor (khususnya investor luar negeri). Untuk mendapatkan keuntungan dari proses penanaman modal itu, pengusaha cenderung berkoalisi dengan pengusaha dan penguasa lokal yang dianggap punya koneksi politik. Adanya aliansi pengusaha dan negara lalu menimbulkan penyimpangan-penyimpangan kebijakan ekonomi, pengusaha akan mendapatkan berbagai fasilitas dari pemerintah dan rakyat yang sering dikenai tanggungan bebannya. Pendeknya, korupsi makin terbuka peluangnya di tengah sistem ekonomi yang salah (kapitalisme Indonesia). Ketiga, prosedur birokrasi yang diskriminatif. Korupsi dapat ditelusuri dari faktor struktural terutama implementasi birokrasi pemerintahan. Terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para birokrat-birokrat yang punya jabatan strategis dan hampir meluas sampai birokrat level bawah.

Pola yang digunakan untuk korupsi banyak dilandasi alasan pelayanan publik, tidak lagi berdasar pada etika (norma) tugas yang mereka emban. Ada semacam penjualan jabatan untuk keperluan birokrasi. Terutama kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perijinan, pemilikan aset negara, pengadaan proyek, tender, perdagangan, dan pembayaran pajak. Lebih-lebih terkait dengan departemen atau lembaga yang nilai anggaran kerjanya cukup besar. Demikian pula menyangkut proses pengambilan keputusan (kebijakan publik), korupsi juga melanda para wakil rakyat. Mereka diindikasikan terlibat kerja sama dengan eksekutif dalam meloloskan suatu kebijakan. Ini dipengaruhi sentralisasi kekuasaan yang dilakukan eksekutif dan memberi kedudukan yang kuat bagi birokrasi. Di sisi lain, korupsi di birokrasi didorong oleh gaji atau penghasilan yang relatif kecil dan dengan korupsi mereka berupaya memperkaya diri.

3. Hambatan-hambatan dalam proses pencegahan dan pemberantasan korupsi bisa dilihat dari masalah SDM dan sistem (hukum). Masalah SDM (pejabat) dapat dijabarkan pada lemahnya komitmen pejabat negara untuk menciptakan aparatur negara yang berwibawa dan bersih dari unsur KKN, kesulitan mereka untuk memisahkan harta pribadi dan harta negara. Ini menyangkut prioritas kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, yang banyak direduksi hanya menjadi kepentingan individu (pejabat). Berikutnya, problem transparansi kekayaan pejabat. Taktikal upaya transparansi ini menyangkut penggelembungan dan pengalihan kekayaan yang dimiliki. Hambatan dari

aspek sistem (hukum) berkaitan dengan intervensi eksekutif, lemahnya pengawasan, rumitnya pembuktian kasus korupsi, dan hukuman terhadap koruptor. Intervensi eksekutif ditandai dengan depolitisasi hampir semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta sentralisasi lembaga eksekutif untuk mengendalikan roda pemerintahan. Model kekuasaan yang terpusat akan menutup kemungkinan adanya kontrol dari luar apalagi dari dalam birokrasi itu sendiri. Ini bisa dicermati dari hubungan kerja yang personal, loyalitas yang tinggi terhadap atasan. Akibatnya, upaya jalur hukum (yuridis formal) sering menemui ganjalan dengan alasan bukti belum cukup dan kuat. Terakhir, untuk menghukum koruptor juga merupakan kendala. Di sini, tidak ada kesamaan yang jelas dalam melaksanakan eksekusi karena beragam pertimbangan baik kemanusiaan (psikologis) maupun jasa (dedikasi) yang telah disumbangkan.

4. Solusi untuk mengatasi korupsi didasari dua aspek. Pertama, aspek sistem (secara struktural). Aspek ini meliputi mekanisme hukum yang tegas dan transparan, penguatan fungsi kontrol, otonomi lembaga, reformasi konstitusi (UUD 1945), dan kenaikan gaji. Mekanisme hukum tersebut menunjuk pada supremasi hukum, bahwa Indonesia betul-betul sebagai negara hukum. Ada pemberdayaan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), aturan-aturan hukum yang tegas, perangkat dan proses hukum yang memperkuat kewibawaan hukum, serta tak seorang pun kebal hukum. Upaya pelurusan dan penguatan hukum bisa dimulai dari reformasi konstitusi untuk menata ulang

paradigma hukum tata negara berhubungan dengan kekuasaan dan hukum secara jelas dalam konteks hidup bernegara. Dengan demikian diharapkan kontrol akan makin menguat dan proses kemandirian lembaga-lembaga negara selain presiden dan lembaga di luar negara akan semakin cepat dan tidak patuh secara mutlak kepada presiden. Sementara kenaikan gaji dimaksudkan untuk menunjang profesionalitas dalam rangka melayani masyarakat. Secara tidak langsung dapat meredam keinginan untuk mencari penghasilan ilegal di luar gaji resmi yang mereka terima. Kedua, peran masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam menciptakan suasana kehidupan yang lebih demokratis. Terutama peran dari pers (media massa) untuk menyuarakan aspirasi masyarakat sekaligus sebagai sarana penyeimbang (kontrol) terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.